

DOKUMEN LKIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
SATPOL PP KOTA DEPOK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 dapat terselesaikan. Dokumen LKIP ini sebagai bentuk penjabaran keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kerja dan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Dokumen LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2021 menjadi salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam hal pelaporan kinerja yang menginformasikan tentang hasil penyelenggaraan kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan. Sehingga hasil-hasil pencapaian kinerja yang dituangkan kedalam dokumen LKIP ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 menjadi tahun transisi antara periode RPJMD 2016-2021 dengan periode RPJMD 2021-2026, dimana pada periode RPJMD 2021-2026 terdapat indikator tujuan Misi Ke-5 yaitu Indeks Trantibum.

Kami menyadari bahwa laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 ini belum sepenuhnya sempurna, maka kami memerlukan saran konstruktif untuk peningkatan nilai SAKIP pada tahun-tahun mendatang.

Depok, Januari 2022
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**

N LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197001271998032004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dokumen LKIP tahun 2021 memberikan gambaran pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Pencapaian kinerja tersebut diukur melalui 3 (tiga) Sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2021, kami sampaikan pada tabel dibawah ini :

MISI KE-1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan							
No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Kinerja Tahun 2021			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	100	88	88	Tidak Tercapai, menemui kendala pada pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin yang dicabut melalui diterbitkannya Perwal 51/2018 sehingga penyelenggaraan penegakan Perda yang bersifat privat masih didasarkan pelimpahan dinas pengampu Perda
		Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	95	100	105,26	Tercapai
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Rasio	0,27	0,27	100	Tercapai
2	Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	Persentase kelompok Mitra Satpol PP yang aktif	%	80	80	100	Tercapai

		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Rasio	8,45	8,45	100	Tercapai
No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Kinerja Tahun 2021			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP Satpol PP	Predikat	BB	-	-	Belum Penilaian SAKIP Tahun 2021 (nilai SAKIP tahun 2020 = 69,11)
		Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik	%	76	51,60	67,89	Tidak tercapai, belum tersusun sistematis aset yang dibutuhkan Satpol PP sedangkan untuk data aset yang dimiliki dan digunakan Satpol PP diperoleh dari system RKBMD
		Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	19,39	20,25	104,41	Tercapai

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut pada tahun anggaran 2021 perubahan didukung oleh 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan serta 21 (dua puluh satu) sub kegiatan didukung dengan besaran anggaran **Rp. 33.656.390.902,00**, sebagaimana realisasi anggaran tahun 2021 kami sampaikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2021			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa
1	Meningkatnya Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.661.877.670	15.978.456.707	95,90	683.420.963
2	Meningkatnya Kententraman Masyarakat					
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	16.994.513.232	14.503.489.818	85,34	2.491.023.414

	Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Total Anggaran 2021 Perubahan			33.656.390.902	30.481.946.525	90,57	3.174.444.377

Untuk mengetahui tingkat kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Depok pada tahun 2021 dapat dilihat dari hasil pengukuran Indeks Trantibum pada tahun 2021, yang dilaksanakan melalui survey dengan melibatkan 1000 (seribu) responden yang tersebar di 63 (enam puluh tiga) Kelurahan di Kota Depok oleh Pihak Ke-III.

Adapun hasilnya kami sampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Skor Akhir Indeks Trantibum Kota Depok				
Realisasi Indeks Trantibum - Kota Depok				
VARIABEL	INDIKATOR	Target	Realisasi	Status
AMAN	Intensitas Pengamanan oleh Satlinmas	70	73,66	Terealisasi
	Jumlah Gangguan Keamanan	90	74,31	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan keamanan	60	75,74	Terealisasi
NYAMAN	Kualitas Penanganan Gangguan Ketentraman	73	75,61	Terealisasi
	Jumlah Gangguan Ketentraman	90	74,22	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan ketentraman	60	75,51	Terealisasi
TERTIB	Kualitas Penegakan Perda & Perkada	73	74,20	Terealisasi
	Jumlah Pelanggaran Perda & Perkada	90	73,99	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan Perda & Perkada	60	70,48	Terealisasi
INDEKS TRANTIBUM		74	74,19	Terealisasi

Demikian ikhtisar eksekutif ini kami sampaikan sebagai informasi hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2021.

Depok, Januari 2022
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA DEPOK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii-iv	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
	1.4 Isu Strategis yang Berpengaruh	3
	1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	PERENCANAAN KERJA	6
	2.1 Perubahan Rencana Strategis 2016-2021	6
	i. Visi	7
	ii. Misi	8
	iii. Tujuan dan Indikator Tujuan	9
	iv. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	9
	v. Strategi/Kebijakan dan Program	10
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
	B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	25
	C. Realisasi Anggaran	34
BAB IV	PENUTUP	37
	4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	37
	4.2 Tantangan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja	38
	4.3 Strategi Penyelesaian Masalah	40
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. SOP Pengumpulan Data Kinerja.	
	2. Form Pengukuran Kinerja Tahun 2021.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/0/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 - 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
19. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A.
21. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 - 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
23. Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2018.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kerja dan kinerja yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan serta sub kegiatan pada tahun 2021, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mengintegrasikan permasalahan-permasalahan dan tantangan serta peluang yang bersifat strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara umum.

Isu strategis tersebut dikelompokkan pada tabel berikut ini :

ISU STRATEGIS	PERMASALAHANNYA	KONDISI IDEAL
1. Penegakan Perda Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat koordinasi penegakan perda antar instansi masih lemah - Tidak ada sinergitas antara satpol pp dengan dinas teknis pengampu perda - Kurangnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha - Kurangnya peran pembinaan pengawasan dan pengendalian (binwasdal) dari dinas pengampu perda 	TERWUJUDNYA SINERGITAS PENEGAKAN PERDA
2. Keberadaan pkL, pengamen, peminta sumbangan, dan pengemis di jalur-jalur protokol mengganggu ketertiban umum ketenteraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - PKL, Pengamen, Peminta Sumbangan dan Pengemis serta Gelandangan kucing-kucingan dengan satpol pp baik saat dilakukan penertiban maupun saat dilaksanakan pengawasan - Peran aktif masyarakat belum terkoordinasi dengan baik oleh satpol pp - Titik gangguan tibum tranmas tidak terawasi secara digital sehingga pelanggaran tidak terkontrol secara sistem 	TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT YANG SISTEMATIS
3. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak kelurahan belum mengerti struktur satlinmas - Anggota satlinmas belum paham tugas dan fungsinya - Pihak kelurahan tidak melakukan pembinaan terhadap anggota satlinmas 	TERWUJUDNYA ANGGOTA SATLINMAS YANG PROFESIONAL

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran.

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, isu strategis yang berpengaruh, serta sistematika penulisan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan secara ringkas Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang berisi sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang harus dilaksanakan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Membahas dan menjabarkan mengenai akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja sasaran dan perbandingan data capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan keberhasilan dan kegagalan kinerja, tantangan dan kendala dalam pencapaian kinerja serta strategi penyelesaian masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja program, strategi pembangunan, kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2016-2021 telah dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan proses penyusunan RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, adalah :

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
- 2) Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun ke depan; dan
- 4) Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun ke depan.

Adapun Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021, disampaikan pada tabel berikut ini :

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius Misi Ke 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP
				2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
				3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP
			2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
				5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib
				6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
			3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase kelompok Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
				8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat

Selanjutnya dijabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran, serta Strategi/Kebijakan dan Program; sebagai berikut :

i. VISI

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta disesuaikan dan/atau disamakan dengan Visi yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.”**

ii. MISI

Pernyataan Misi adalah pernyataan tentang bagaimana mewujudkan visi, apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasil yang akan dicapai, dengan memperhatikan tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Satuan Polisi Pamong Praja masuk ke dalam Misi Ke-1 (satu) RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021, yakni ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.”***

Misi tersebut mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertekad untuk meningkatkan tata kelola menuju efektivitas kinerja yang lebih terukur dalam rangka pencapaian kinerja secara komprehensif.

Untuk mewujudkan misi tersebut, didasarkan pada seperangkat norma-norma yang terkandung dalam budaya kerja organisasi. Budaya kerja organisasi yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, antara lain:

1. Integritas yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan para pegawainya, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengerahkan sepenuhnya seluruh kemampuannya dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada peraturan yang berlaku secara bertanggung jawab.
2. Kejujuran yang bermakna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan para pegawainya, dalam menjalankan tugasnya berdasar pada fakta, tidak memanipulasi perkataan ataupun tindakan dan memegang teguh kebenaran.
3. Akuntabel yang bermakna bahwa hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah terukur sesuai dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka khususnya kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan ataupun pihak lain yang terkait.
4. Transparansi yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Depok, serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Proaktif yang bermakna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan para aparaturnya, dalam menjalankan tugasnya senantiasa berinisiatif dalam setiap kesempatan dan menyelesaikan tugas hingga tuntas.
6. Profesional yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan para aparaturnya, dalam menjalankan tugasnya telah memiliki kemampuan, keterampilan, dan menguasai bermacam-macam masalah teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

iii. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan berdasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja pada Misi Ke-1 (satu) RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021, yakni “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan*” adalah “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum.**”

Tujuan tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah Penegakan Perda dan/atau Perwal sehingga mampu memberikan upaya dalam rangka menciptakan kondisi yang tertib, nyaman, dan unggul di wilayah yang menjadi titik-titik pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga indikator pada tujuan ini adalah “**Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.**”

iv. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator kinerja sasaran dan target, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada Tahun 2016-2021 berdasarkan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
	8. Cakupan Patroli Siaga Kententraman Masyarakat

v. STRATEGI/KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi/Kebijakan adalah arah langkah dan tindakan yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan, dirancang strategi/kebijakan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi/Kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi/kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan.

Adapun strategi/kebijakan serta program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sampai dengan tahun 2021 didasarkan pada masing-masing indikator kinerja sasaran pada Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1. Predikat SAKIP Satpol PP	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik			
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Meningkatkan SDM Aparatur Satpol PP	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Satpol PP	
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Meningkatkan Ketertiban Umum dengan melakukan kerjasama ter-Integrasi dengan Instansi terkait	Peningkatan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib			
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas			
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Meningkatkan Kentraman Masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan Kentraman Masyarakat	
8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat			

1.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 disampaikan pada tabel dibawah ini :

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Predikat SAKIP Satpol PP	BB
		2	Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik	76%
		3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	19,39%
2	Meningkatnya Ketertiban Umum	4	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwa	100%
		5	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	95%
		6	Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,27
3	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	80%
		8	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	8,45

Untuk mewujudkan 3 (tiga) Sasaran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut, didukung program dan anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.661.877.670	APBD-P
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.994.513.232	APBD-P
Total Anggaran 2021 Perubahan		33.656.390.902	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satpol PP Kota Depok yang disesuaikan dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP Satpol PP Kota Depok ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam dokumen Perubahan Renstra Satpol PP yang disinkronisasikan dengan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 dan hasil Asistensi KemenPAN dan RB pada tanggal 19 Desember 2017, yang dimaksudkan agar ada keterkaitan pada kedua dokumen tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai dengan rencana strategis.

Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) tersebut, antara lain :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP 2. Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik 3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Sasaran ke-1 dan indikatornya adalah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan dan menjadi tolok ukur peningkatan akuntabilitas kinerja, yang didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya ketertiban umum	1. Cakupan penegakan Perda dan/atau Perwal 2. Persentase kawasan rawan trantibum yang tertib 3. Cakupan rasio petugas Linmas	Sasaran ke-2 dan ke-3 dan indikatornya adalah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan, yang didukung Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3	Meningkatnya ketenteraman masyarakat	1. Persentase mitra kerja Satpol PP yang aktif 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2017, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok masuk pada Misi ke-1 (satu) RPJMD sebagaimana ditampilkam sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
1	2		3
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan			
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan yang akuntabel	1	Predikat SAKIP Satpol PP	Pada tahun 2020 mendapatkan predikat B dengan nilai 69,11, dan pada tahun 2021 belum dilakukan penilaian

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran	IKU	Formulasi
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	Penilaian diambil dari bobot Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja; yang selanjutnya dilakukan oleh Inspektorat
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan dibagi Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan dikali 100
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100

Sasaran	IKU	Formulasi
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100
	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT yang dilakukan pengawasan oleh Satlinmas
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dln pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang disediakan DIKALI 100
	8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan

Terhadap penetapan ke-8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut, dilakukan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Untuk diketahui bahwa pada tahun 2021 ada 1 (satu) indikator kinerja utama yang belum diketahui hasil/capainya yakni Predikat Sakip Satpol PP karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat.

Adapun tabel pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, kami sampaikan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Ket				
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Predikat SAKIP Satpol PP	Predikat	B	B	100	B	B	100	B	B	-	BB	B	-	BB	B	-	BB	-	-	Non Kumulatif				
2	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	%	32	42	131,25	40	46	115	58	57,88	99,79	76	50	65,79	76	76	100	76	51,60	67,89	Kumulatif				
3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	11,11	11,44	102,94	13,42	13,65	101,71	14,75	16,38	111,02	16,13	16,79	104,09	17,74	16,23	91,50	19,35	20,25	104,41	Kumulatif				
4	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	56	54,69	97,22	70	76,56	110,11	73	85,00	117,09	81	91,11	111,82	92	87,32	95,38	100	88	88	Kumulatif				
5	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	57,44	41,03	71,43	63,08	46,15	73,17	68,72	83,59	121,64	80	85,64	107,05	89,23	80,51	90,23	95	100	105,26	Kumulatif				
6	Cakupan Rasio Petugas Linmas	Rasio	0,15	0,12	83,33	0,17	0,11	63,27	0,20	0,21	105,31	0,22	0,22	100	0,25	0,22	88	0,27	0,27	100	Kumulatif				
7	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	%	3,97	5,00	126,00	6,35	6	94,50	61,11	61,85	101,21	71	79,63	112,15	76	76	100	80	80	100	Kumulatif				
8	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Rasio	5,73	5,73	100	6,27	6	95,65	6,82	5,27	77,33	7,36	7,36	100	7,91	7,91	100	8,45	8,45	100	Kumulatif				
Rata-Rata Capaian IKU					101,52				94,18				91,68				100,13				95,02				95,08

Rincian keterangan realisasi dari setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun anggaran 2021 perubahan berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

1. Predikat SAKIP Satpol PP.

Pada indikator ini belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kota Depok. Adapun bobot penilaian terhadap predikat SAKIP Satpol PP diambil dari bobot Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok membentuk TIPEKIN (Tim Penilaian Kinerja) yang beranggotakan dari setiap unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Tim ini bertugas melakukan pengukuran kinerja pada setiap Triwulan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pendukung pencapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melalui pembentukan TIPEKIN diharapkan dapat memperbaiki nilai SAKIP pada tahun-tahun berikutnya.

(Gambar 1. Edukasi Tipekin terhadap keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama dengan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi selanjutnya disebut sebagai kinerja Satpol PP Tahun 2021)

2. Persentase aset Satpol PP kondisi baik.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan dibagi Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan dikali 100.

Berikut ini adalah pencapaian pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Persen	76	51,60	67,89
Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan	Unit	1140	774	
Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP	Unit	1500	1500	

Pencapaian indikator kinerja utama **Persentase Aset Satpol PP kondisi baik** tidak 100%, disebabkan belum disusunnya sistematika aset yang dibutuhkan Satpol PP sedangkan terhadap jumlah aset yang dimiliki dan digunakan Satpol PP datanya diperoleh dari *system RKBMD* yang dilakukan pengukuran pada setiap bulan di tahun 2021.

3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100.

Berikut ini adalah pencapaian pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Persen	19,39	20,25	104,41
Jumlah Aparatur Satpol PP yg memiliki Kompetensi	Orang	64	65	
- PNS Satpol PP yg memiliki Kompetensi (Jafung Pol PP)	Orang	64	65	
Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan	Orang	330	321	
1. PNS Satpol PP	Orang	95	85	
2. Tenaga Kontrak Satpol PP (SK.Walikota)	Orang	3	3	
3. Tenaga Satgas Pol PP	Orang	232	233	

Pencapaian indikator kinerja utama **Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP** mengalami kenaikan yang disebabkan adanya penambahan pada PNS Satpol PP yang memiliki kompetensi yang dihitung dari jumlah jabatan fungsional Pol PP ditambah dengan jumlah PNS Satpol PP yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Namun, diperlukan pemetaan *jobdesk* aparatur untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada aparatur yang berkinerja baik.

(Gambar 2. Wali Kota Depok berfoto bersama dengan Ka.Satpol PP beserta jajaran aparaturnya)

4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.

Pada indikator ini, formulasi penghitungannya adalah Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100.

Berikut ini adalah pencapaian pada tahun 2021 :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwa	Persen	100	88	88
Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	titik/kasus	100	88	
Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau	titik/kasus	100	100	

Pencapaian indikator kinerja utama Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwa menemui kendala pada pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin yang dicabut melalui diterbitkannya Perwal 51/2018 sehingga penyelenggaraan penegakan Perda yang bersifat privat masih didasarkan pada pelimpahan dinas pengampu Perda. Karena hal tersebut dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu perda.

(Gambar 3. Upaya penyegelan Satpol PP didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari Dinas Pengampu Perda)

5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100

Berikut ini adalah pencapaian pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Persen	95	100	105,26
Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan	titik	95	100	
Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan	titik	100	100	

Pencapaian indikator kinerja utama Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib dipengaruhi pada aktifnya pengaduan masyarakat kepada Satpol PP. Permasalahannya adalah gangguan trantibum atau bentuk pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum selalu terjadi pada lokasi yang sama. Upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Depok yaitu melakukan penjagaan dan patroli tetapi tidak cukup dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan

keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Depok, sehingga diperlukan peningkatan kolaborasi dengan TNI, POLRI, Dinas terkait untuk menjaga lokasi atau kawasan rawan Trantibum

(Gambar 4. Pengawasan dan penertiban PKL dan Parkir Liar dikawasan kolong fly over Jl.Arif Rahman Hakim)

6. Cakupan Rasio Petugas Linmas.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT yang dilakukan pengawasan oleh Anggota Satlinmas.

Berikut ini adalah pencapaian pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persen	0,27	0,27	100
Jumlah Satuan Linmas	orang	630	630	
Jumlah RT yang dilakukan pengawasan Satlinmas	RT	2300	2300	

Pencapaian indikator kinerja utama Cakupan Rasio Petugas Linmas dipengaruhi oleh pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Satpol PP dalam kerangka

meningkatkan kinerja Satlinmas berbasis lingkungan yaitu tingkat RT, namun perlu peran aktif Pihak Kelurahan untuk memberdayakan Satlinmas sesuai Permendagri 26 Tahun 2020.



(Gambar 5. Keaktifan Anggota Satlinmas menjaga ketenteraman masyarakat di lingkungan RT)

7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dalam pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP disediakan DIKALI 100.

Berikut ini adalah pencapaian indikator kinerja utama Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kelompok Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Persen	80	80	100
Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi dalam kegiatan	orang	100	100	
Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang disediakan	orangl	125	125	

Pencapaian indikator kinerja utama Persentase Kelompok Mitra Kerja Satpol PP yang Aktif adalah sebagai upaya Satpol PP meningkatkan kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Dinas Terkait sehingga dapat diharapkan mampu mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok.

(Gambar 6. Bentuk kolaborasi Satpol PP dengan TNI, POLRI, dan Dinas Teknis terkait dalam pelaksanaan penertiban)

8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

Pada indikator ini, formulasi penghitungan targetnya menggunakan rumus Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan.

Adapun penghitungannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama dan Rincian Indikator Kinerja	2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Rasio	8,45	8,45	100
Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli/hari	Akumulasi	93	93	
<i>Kelompok Patroli</i>	<i>kp</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	
<i>Banyaknya patroli dalam sehari</i>	<i>kali</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	

Banyaknya kelompok kecamatan	kecamatan	11	11	
------------------------------	-----------	----	----	--

Kendala utama pada pelaksanaan Patroli 24 Jam adalah keterbatasan sarana prasarana Satpol PP berupa kendaraan operasional sehingga mengganggu penjadwalan pelaksanaan patroli yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam sehari.

(Gambar 7. Tindakan penertiban Spanduk yang melintang yang dilakukan oleh Tim Patroli 24 Jam Satpol PP)

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.

I. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Berikut ini adalah pengukuran kinerja sasaran strategis berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 dimana dilakukan perbandingan terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2020, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2019 dengan tahun 2021**

MISI KE-1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan										
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Keterangan
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	Predikat	BB	B	-	BB	-	-	Belum Penilaian
		2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	%	76	76	100	76	51,60	67,89	Tidak tercapai, belum tersusun sistematis aset yang dibutuhkan Satpol PP sedangkan untuk data aset yang dimiliki dan digunakan Satpol PP diperoleh dari <i>system RKBMD</i>
		3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	17,74	16,23	91,50	19,39	20,25	104,41	Tercapai
2	Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	91,55	87,32	95,38	100	88	88	Tidak Tercapai, menemui kendala pada pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin yang dicabut melalui diterbitkannya Perwal 51/2018 sehingga penyelenggaraan penegakan Perda yang bersifat privat masih didasarkan pelimpahan dinas pengampu Perda
		5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	89,23	80,51	90,23	95	100	105,26	Tercapai
		6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	Rasio	0,25	0,22	88	0,27	0,27	100	Tercapai
4	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Kelompok Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	%	76	76	100	80	80	100	Tercapai
		8. Cakupan Patroli Siaga Tibum Tranmas	Rasio	7,91	7,91	100	8,45	8,45	100	Tercapai

Berdasarkan tabel Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 tersebut diatas, dapat diperoleh data dan informasi capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2021, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini :

**Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP Satpol PP	-	SAKIP Tahun 2021 belum penilaian
		Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	67,89	Tidak Mencapai Target (<100%)
		Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	104,41	Melebihi/Melampaui Target (>100%)
2	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	88	Tidak Mencapai Target (<100%)
		Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	105,26	Melebihi/Melampaui Target (>100%)
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	100	Sesuai Target (=100%)
3	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase kelompok Mitra Satpol PP yang aktif	100	Sesuai Target (=100%)
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	100	Sesuai Target (=100%)

Dari ke-3 (tiga) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan (kecuali Predikat SAKIP Satpol PP) pada pelaksanaan Misi ke-1 (satu) RPJMD, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Pencapaian Target Misi Tahun 2020

No	Misi	Jumlah Indikator Utama	Tingkat Pencapaian Kinerja		
			Melebihi/Melampaui Target (>100%)	Sesuai Target (100%)	Tidak Mencapai Target (<100%)
			Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Misi ke-1	8	2	3	2

Keterangan : 1 (satu) Indikator kinerja sasaran Predikat SAKIP Satpol PP tahun 2021 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, secara rinci dengan tolok ukur pencapaian kinerja pada indikator kinerja sasaran strategis serta target dan capaian targetnya diukur, dievaluasi, dan dianalisis melalui pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran, sehingga diketahui keterkaitan kinerja yang ditetapkan dengan kinerja yang dilaksanakan dari setiap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis.

Adapun evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2020 dibagi pada setiap sasaran strategis sebagaimana berikut :

1. Sasaran Strategis ke-1 (satu) : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik.

Sasaran Strategis kesatu memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang didukung 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis I

Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Didukung	
			Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan
1	Predikat SAKIP Satpol PP	Predikat	BB	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	%	76	51,60	67,89		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	19,39	20,25	104,41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2021 dilakukan perbandingan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ke-1 (satu) dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2020.

Sebagai berikut :

Tabel Analisis Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis I
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	-	BB	-	-
2	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	%	76	76	100	76	51,60	67,89
3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	17,74	16,23	91,50	19,35	20,25	104,41

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yakni Predikat SAKIP Satpol PP (yang belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kota Depok di tahun 2021) sedangkan pada tahun 2020 mendapat predikat B dengan nilai 69,11; Persentase Aset Satpol PP kondisi baik capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100% mengalami penurunan pada tahun 2021 yang capaian kinerjanya 67,89% disebabkan belum tersusunnya sistematisa aset Satpol PP yang dibutuhkan sedangkan pengukuran aset yang dimiliki dan digunakan diukur melalui *system RKBMD*; dan Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 91,50% mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 104,41% karena dilakukan pengukuran pada ASN Satpol PP yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa selain Pejabat Fungsional Pol PP.

Berikut ini adalah rincian realisasi indikator kinerja pada sasaran ke-1 (satu) pada tahun 2021, yang dihitung melalui indikator kinerja pendukung IKU, antara lain :

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	Formulasi	Keterangan
1	Predikat SAKIP Satpol PP	BB	-	Penghitungan SAKIP diambil dari bobot Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja	Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.
2	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	76%	51,60%	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan DIBAGI Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan DIKALI 100	Sumber Data : Sub. Bagian Umum Sekretariat Satpol PP.
2.1	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan	1140 unit	774 unit		
2.2	Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP	1500 unit	1500 unit		

3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	19,39 %	20,25%	Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100	Sumber Data : Sub. Bagian Umum Sekretariat Satpol PP.
3.1	Jumlah Aparatur Satpol PP yg memiliki Kompetensi	64 org	65 org		
	- PNS Satpol PP yg memiliki Kompetensi	64 org	65 org		
3.2	Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan	330 org	321 org		
	- PNS Satpol PP	95 org	85 org		
	- Tenaga Kontrak Satpol PP (SK.Walikota)	3 org	3 org		
	- Tenaga Satgas Pol PP	232 org	233 org		

Sasaran Strategis ke-1 (satu) meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik didukung 1 (satu) Program dan 5 (lima) Kegiatan sebagaimana disampaikan analisis pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, sebagai berikut :

Tabel Analisis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Perubahan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 (satu) : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2021		Realisasi 2021		Capaian (%)	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	16.994.513.232	100%	14.503.489.818	100%	85,34 %
		Nilai SAKIP	72		-		-	
		Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%		86,26 %		86,26 %	
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%		91%		91%	
		Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%		45%		100%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	192.589.000	100%	168.174.000	100%	87,32%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	72	14.463.712.532	-	12.406.731.666	-	85,78%

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%	381.980.000	45%	301.111.500	100%	78,83%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	961.566.700	88,26%	767.056.500	88,26%	79,77%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	994.665000	91,23%	860.416.152	91,23%	86,50%

2. Sasaran Strategis ke-2 (dua) meningkatnya ketertiban umum memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama, dan sasaran strategis ke-3 (tiga) yakni meningkatnya ketenteraman masyarakat memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama.

Dalam rangka pencapaian kinerja, kedua sasaran tersebut didukung 1 (satu) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 1 (satu) kegiatan diantaranya di refocusing menjadi Nol Rupiah yaitu kegiatan Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM.

Sebagaimana analisis pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran II dan Sasaran III

Meningkatnya Ketertiban Umum dan Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Didukung	
			Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan
1	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	100	88	88	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	95	100	105,26		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	rasio	0,27	0,27	100		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
4	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	%	80	80	100		
5	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	rasio	8,45	8,45	100		

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2021 pada sasaran strategis ke-2 (dua) dan sasaran strategis ke-3 (tiga) dilakukan perbandingan pencapaian kinerja tahun dengan tahun 2020.

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis ke-2 (dua) dan sasaran strategis ke-3 (tiga), analisisnya sebagai berikut :

Tabel Analisis Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Ke-II
Meningkatnya Ketertiban Umum

No	IKU	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	91,55	87,32	95,38	100	88	88
2	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	89,23	80,51	90,23	95	100	105,26
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	Rasio	0,25	0,22	88	0,27	0,27	100

Keterangan perbandingan pencapaian target kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021, sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.

Formulasi Penghitungan Targetnya adalah Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau DIKALI 100.

Pencapaian target kinerja baik pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan pencapaian tahun 2020 hal ini dipengaruhi jadwal penugasan hasil pelimpahan kewenangan dari Dinas Pengampu Perda selalu berubah sehingga terjadi benturan penugasan di lapangan.

2. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib.

Formulasi Penghitungan Targetnya adalah Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100.

Ketercapaian pada tahun 2021 disebabkan oleh pelaksanaan penjagaan dan patroli pasca penertiban, namun pelanggaran tetap terjadi sehingga diperlukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk melalui melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP.

3. Cakupan Rasio Petugas Linmas.

Formulasi Penghitungan Targetnya adalah Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT yang dilakukan pengawasan oleh Satlinmas.

Pencapaian tahun 2021 adalah 100% atau mencapai target, namun perlu keterlibatan aktif pihak Kelurahan untuk melakukan pemberdayaan Satlinmas.

Rincian penghitungan realisasi target indikator kinerja utama pada sasaran ke-2 (dua) Meningkatnya Ketertiban Umum pada tahun 2021, antara lain :

No	IKU dan Indikator Kinerja Pendukung	Kinerja 2021		Formulasi	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	92%	88%	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100	Sumber data dari Bidang Gakda dan Bidang Trantibum Pamwal
	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	100 titik/kasus	88 titik/kasus		
	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau	100 titik/kasus	100 titik/kasus		
2	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	95%	100%	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100	Sumber data dari Bidang Trantibum Pamwal
	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan	95 titik	100 titik		
	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan	100 titik	100 titik		
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,27	0,27	Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT yang dilakukan pengawasan oleh Satlinmas	Sumber data dari Bidang PSD Linmas
	Jumlah Satuan Linmas	630	630		
	Jumlah RT yang dilakukan pengawasan Satlinmas	2300	2300		

Selanjutnya pencapaian kinerja pada sasaran strategis ke-3 (tiga) tahun 2021, analisisnya sebagai berikut :

Tabel Analisis Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis III
Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat

No	IKU	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	%	76	76	100%	80	80	100%
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat	Rasio	7,91	7,91	100%	8,45	8,45	100%

Keterangan perbandingan pencapaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 :

1. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif.

Formulasi penghitungan targetnya adalah Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dlm pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP disediakan DIKALI 100. Pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini 100%, dimana dilakukan upaya peningkatan kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Dinas Terkait untuk menjaga ketertiban umum dna ketenteraman masyarakat.

2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat.

Formulasi Penghitungan Targetnya adalah Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan. Pencapaian kinerja 100% ini diperoleh dari hasil-hasil pelaksanaan Patroli 24 Jam yang terbagi 2 wilayah yaitu Barat, Tengah, dan Timur yang terjadwalkan.

Untuk diketahui bahwa untuk ke-2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Ketenteraman Masyarakat tersebut, berdasarkan data dari Bidang Tranmastibum dan Pamwal serta Bidang Gakda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Dan penghitungan pencapaiannya yang didasarkan pada masing-masing formulasi penghitungan target indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

No	IKU dan Indikator Kinerja Pendukung	Target 2021	Realisasi	Formulasi	Keterangan
1	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	80	80	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dlm pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP disediakan DIKALI 100	Data jumlah mitra kerja Satpol PP yang aktif merupakan keterlibatan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas terkait, Kecamatan/Kelurahan, dan unsur lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan Satpol PP di lapangan.
	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 orang	100 orang		
	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang disediakan	125 orang	125 orang		
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat	8,45	8,45	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan	Berdasarkan Data dari Bidang Tranmastibum Pamwal dimana dilakukan Patroli 24 Jam untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari	93	93		
	a.kelompok patroli	31	31		
	b.banyaknya patroli dalam sehari	3	3		
	Banyaknya kelompok kecamatan	11	11		
Terdapat 11 (sebelas) Kecamatan di Kota Depok	11	11			

Selanjutnya pada Sasaran Strategis Ke-II (Meningkatnya Ketertiban Umum) dan Sasaran Strategis Ke-III (Meningkatnya Ketentraman Masyarakat), didukung oleh 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 Perubahan, sebagaimana kami sampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2021 perubahan yang Mendukung Pencapaian Sasaran II dan Pencapaian Sasaran III.

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	Rp
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	16.661.877.670	100%	15.978.456.707	100%	95,90%
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,27		0,27		100%	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	15.569.238.940	100%	15.119.178.807	100%	96,57%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	921.401.100	100%	781.660.900	100%	84,49%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	80.000.000	100%	77.617.000	100%	97,02%

C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Langsung (BL), dan memiliki perbedaan pada struktur nama program dan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019.

Adapun alokasi anggaran tersebut kami sampaikan tabel alokasi anggaran dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 serta tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel I. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2016

Uraian	2016			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BTL	8,025,450,312	7,569,791,205	94%	455,659,107
BL	19,487,930,000	17,273,589,411	89%	2,214,340,589
Total Anggaran	27,513,380,312	24,843,380,616	90%	2,669,999,696

Tabel II. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2017

Uraian	2017			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BTL	10.316.656.736	8.553.020.160	82,90%	1.763.636.576
BL	15.929.774.500	14.204.927.620	89,17%	1.724.846.880
Total Anggaran	26.246.431.236	22.757.947.780	86,71%	3.488.483.456

Tabel III. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2018

Uraian	2018			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BTL	10.165.424.839	8.489.429.317	83,51%	1.675.995.522
BL	22.390.620.300	19.258.034.147	86,01%	3.132.586.153
Total Anggaran	32.556.045.139	27.747.463.464	85,23%	4.808.581.675

Tabel IV. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2019

Uraian	2019			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BTL	15.790.482.332	11.857.580.192	75,09%	3.932.902.140
BL	20.130.720.300	18.532.606.167	92,06%	1.598.114.113
Total Anggaran	35.921.202.632	30.390.186.359	84,60%	5.531.016.273

Tabel V. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2020

Uraian	2020			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BTL	15.101.150.649	11.568.824.891	76,61%	3.532.235.758
BL	20.215.427.700	18.557.436.513	91,80%	1.657.991.187
Total Anggaran	35.316.578.349	30.126.261.404	85,30%	5.190.316.945

Tabel VI. Alokasi dan Penyerapan anggaran tahun 2021

Uraian	2021			
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
BL	33.656.390.902	30.481.946.525	90,57%	3.174.444.377
Total Anggaran	33.656.390.902	30.481.946.525	90,57%	3.174.444.377

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung pada perubahan anggaran tahun 2021 yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Misi 1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Anggaran 2021	Realisasi	Capaian (%)
				Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	16.994.513.232	14.503.489.818	85,34
		2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik				
		3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP				
2	Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.661.877.670	15.978.456.707	95,90
		5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib				
		6. Cakupan Rasio Petugas Linmas				
3	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase kelompok Mitra Kerja Satpol PP yang aktif				
		8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat				
Total Anggaran Tahun 2021 Perubahan				33.656.390.902	30.481.946.525	90,57

BAB IV

PENUTUP

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Keberhasilan dan kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021, kami gambarkan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	%	100	88	88
		Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	%	95	100	105,26
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Rasio	0,27	0,27	100
2	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase kelompok Mitra Satpol PP yang aktif	%	80	80	100
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Rasio	8,45	8,45	100
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP Satpol PP	Predikat	<i>BB</i>	-	-
		Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik	%	76	51,60	67,89
		Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	%	19,39	20,25	104,41

Pada tabel pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 diatas, diketahui keberhasilan kinerja didapat dari 5 (lima) indikator kinerja utama yang targetnya tercapai, antara lain :

1. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib, capaiannya 105,26% atau melampaui target (>100%).
2. Cakupan Rasio Petugas Linmas, capaiannya 100% atau sesuai target (=100%).
3. Persentase kelompok Mitra Satpol PP yang aktif, capaiannya 100% atau sesuai target (=100%).

4. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat, capaiannya 100% atau sesuai target (=100%).
5. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP, capaiannya 104,41% atau melampaui target (>100%).

Sedangkan terdapat kegagalan kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya dibawah 100% (<100%), antara lain :

1. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal, capaiannya 88%.
Hal ini dipengaruhi pada tidak optimalnya pada aspek pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin sebagaimana dicabut melalui diterbitkannya Perwal 51/2018 sehingga penyelenggaraan penegakan Perda yang bersifat privat masih didasarkan pada pelimpahan dari dinas pengampu Perda. Selain itu, dari pelimpahan kewenangan tersebut terjadi benturan penugasan yang berakibat miskomunikasi dalam melaksanakan eksekusi di lapangan sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dengan Dinas Pengampu Perda.
2. Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik, capaiannya 67,89%.
Tidak tercapainya indikator kinerja utama ini, disebabkan belum tersusunnya sistematisa aset (sarana prasarana) yang dibutuhkan Satpol PP sedangkan untuk data aset yang dimiliki dan digunakan Satpol PP diperoleh dari *system RKBMD* yang di-review setiap bulan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja baik secara administratif maupun kelengkapan peralatan dan perlengkapan petugas di lapangan yang perlu dipetakan sehingga dapat diketahui data aset yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang belum dilakukan penilaian, yaitu Predikat SAKIP Satpol PP. Pada tahun 2021 nilai SAKIP Satpol PP adalah 69,11. Untuk meningkatkan nilai SAKIP Satpol PP tahun 2021, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membentuk TIPEKIN (Tim Penilaian Kinerja) yang beranggotakan dari setiap unit kerja. Tugas utama TIPEKIN adalah mengevaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada setiap Triwulan di tahun 2021.

4.2 TANTANGAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Tantangan utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melakukan pengukuran Indeks Trantibum di Kota Depok pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pihak Ke-III.

Adapun hasil yang diperoleh terhadap pengukuran indeks trantibum pada tahun 2021, kami sampaikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel Skor Akhir Indeks Trantibum Kota Depok				
Realisasi Indeks Trantibum - Kota Depok				
VARIABEL	INDIKATOR	Target	Realisasi	Status
AMAN	Intensitas Pengamanan oleh Satlinmas	70	73,66	Terealisasi
	Jumlah Gangguan Keamanan	90	74,31	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan keamanan	60	75,74	Terealisasi
NYAMAN	Kualitas Penanganan Gangguan Ketentraman	73	75,61	Terealisasi
	Jumlah Gangguan Ketentraman	90	74,22	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan ketentraman	60	75,51	Terealisasi
TERTIB	Kualitas Penegakan Perda & Perkada	73	74,20	Terealisasi
	Jumlah Pelanggaran Perda & Perkada	90	73,99	Belum Terealisasi
	Penilaian publik penyelenggaraan Perda & Perkada	60	70,48	Terealisasi
INDEKS TRANTIBUM		74	74,19	Terealisasi

Lalu, kendala utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan sarana prasarana yang menyebabkan belum efektifnya hasil pelaksanaan tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Serta diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat kontinyu.

4.3 STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Terkait dengan tantangan dan kendala sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok berupaya dan/atau memiliki strategi untuk melakukan perbaikan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya, khususnya yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; kebijakan penegaran Peraturan Daerah, serta perlindungan masyarakat, antara lain :

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan Satpol PP.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP.
3. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar dinas/instansi terkait.
4. Meningkatkan hubungan terkoordinatif dengan masyarakat.